

## [Siaran Pers](#)

### **Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan**

# *Koalisi Mengapresiasi Kejelasan Booster bagi Penerima Vaksin Janssen*

**JAKARTA- 13 April 2022**

**Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan** mengapresiasi respons cepat Kementerian Kesehatan yang menegaskan bahwa penerima vaksin Janssen (dari Johnson & Johnson) tetap berhak menerima vaksin penguat (*booster*).

Kementerian Kesehatan melalui siaran persnya, Jumat (8 April 2022) menyatakan bahwa Vaksin Janssen telah dianggap sebagai vaksin lengkap (seperti vaksin lain yang menerapkan dua dosis) meski peruntukannya hanya untuk sekali suntik.

Pernyataan Kementerian Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi rujukan para pihak yang terkait dengan kegiatan vaksinasi dan layanan publik yang mensyaratkan vaksinasi untuk memberikan akses dan layanan bagi penerima vaksin Janssen yang didominasi oleh kelompok rentan.

Dengan demikian, seperti termaktub dalam Surat Edaran Dirjen P2P No. SR.02.06/II/1188/2022 tentang penambahan regimen vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (*booster*), penerima Vaksin Janssen bisa mendapatkan *booster* jenis Moderna. Vaksin penguat tersebut bisa diterima setelah 3 bulan dari waktu vaksinasi primer terakhir.

**Hamid Abidin**, koordinator Koalisi, menyatakan bahwa penegasan dari Kementerian Kesehatan itu bisa menjadi solusi bagi kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh penerima vaksin Janssen. Penegasan ini bisa jadi pedoman para pihak yang terkait dengan kegiatan vaksinasi dan menjadi rujukan kebijakan bagi kelompok rentan saat mengalami gejala dalam mendapatkan *booster* dan mengakses transportasi publik yang mensyaratkan vaksinasi. Pernyataan Kemenkes ini merupakan langkah bagus bagi kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan vaksinasi.

“Dengan respons cepat ini, kendala di lapangan bisa menemukan solusi sehingga kolaborasi makin erat dan cakupan vaksinasi bisa lebih diperluas,” kata Hamid.

Hamid, yang juga Sekretaris Badan Pengurus **Filantropi Indonesia**, menjelaskan siaran pers yang sebelumnya dipublikasikan oleh Koalisi tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan solusi dari Kementerian Kesehatan dan Lembaga lainnya atas persoalan yang

dihadapi kelompok rentan. Lebih dari itu, siaran pers juga menjadi sarana edukasi publik terhadap suatu isu atau persoalan yang dihadapi kelompok rentan penerima vaksin Janssen. Apalagi persoalan ini juga terkait dengan koordinasi lintas kementerian/instansi dan minimnya pemahaman masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan *stakeholder* program vaksinasi lainnya mengenai spesifikasi dan kekhasan vaksin Janssen.

Sebelumnya, penerima vaksin Janssen dilaporkan mengalami kesulitan mengakses *booster* karena hanya boleh satu kali suntik. Mereka juga mengalami kendala saat mengakses transportasi publik yang mensyaratkan sertifikat vaksin dosis 1 dan 2.

“Dengan adanya penegasan dari Kementerian Kesehatan ini, maka menjadi titik terang bagi penerima vaksin Janssen untuk mendapatkan *booster* dan mengakses layanan publik yang mensyaratkan vaksinasi,” ujar Hamid.

Data dari Kementerian Kesehatan per Selasa (12 April 2022) pukul 12.00 WIB, menunjukkan vaksin dosis 1 telah mencapai 94,91% atau sebanyak 197,66 juta dosis. Sedangkan vaksin dosis 2, sudah mencapai 161,76 juta dosis, setara 77,67%. Untuk *booster*, sudah mencapai 27,96 juta dosis atau 13,43% dari target vaksinasi 208,26 juta jiwa.

\* \* \*

## **Tentang Koalisi**

**Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan** adalah koalisi organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memberikan perhatian dan dukungan akses vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Adat dan kelompok-kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan anak-anak. Koalisi ini terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, ormas keagamaan, organisasi filantropi, dan komunitas. Beberapa anggota Koalisi antara lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Filantropi Indonesia (FI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Pihak yang Bisa Dihubungi:

- Hamid Abidin (Filantropi Indonesia) [hamid@filantropi.or.id](mailto:hamid@filantropi.or.id) +62 856-9129-5777